

**INTERPRETASI LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BOJONEGORO PASCA PANDEMI *COVID-19*
MELALUI ANALISIS KONDISI KEUANGAN TAHUN
2022-2024**

**Penelitian Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1**

Program Studi Akuntansi



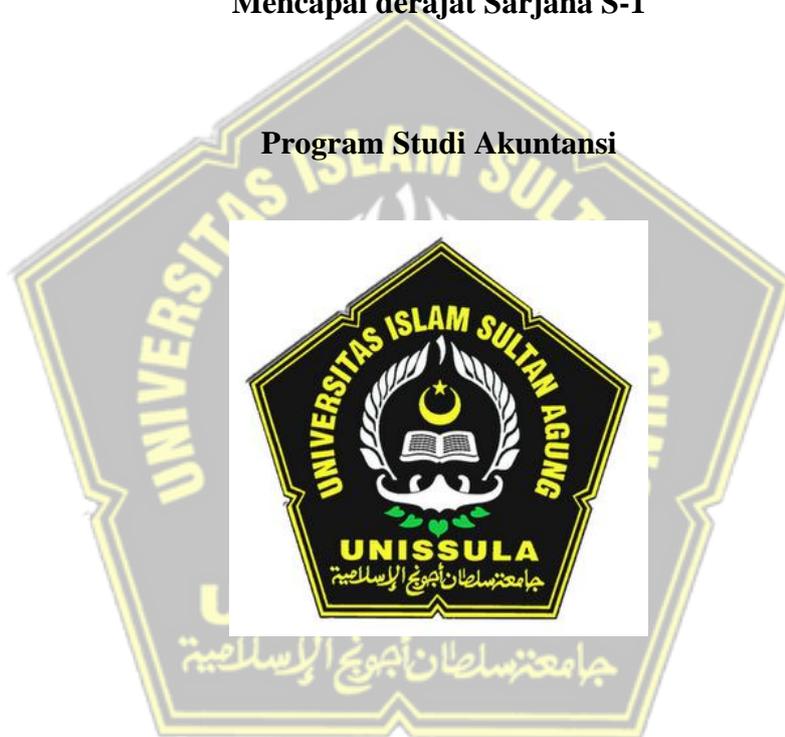
Disusun Oleh :
Mellya Oka Rahmawati
Nim: 31402300204

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025**

**INTERPRETASI LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BOJONEGORO PASCA PANDEMI *COVID-19*
MELALUI ANALISIS KONDISI KEUANGAN TAHUN
2022-2024**

**Penelitian Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :
Mellya Oka Rahmawati
Nim: 31402300204

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025**

SKRIPSI

INTERPRETASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO PASCA PANDEMI *COVID-19* MELALUI ANALISIS KONDISI KEUANGAN TAHUN 2022-2024

Disusun Oleh :

Mellya Oka Rahmawati

Nim: 31402300204

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 26 Mei 2025

Pembimbing,

Dr. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIK. 211402010

**INTERPRETASI LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BOJONEGORO PASCA PANDEMI *COVID-19*
MELALUI ANALISIS KONDISI KEUANGAN TAHUN
2022-2024**

Disusun Oleh :
Mellya Oka Rahmawati
Nim: 31402300204

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 26 Mei 2025

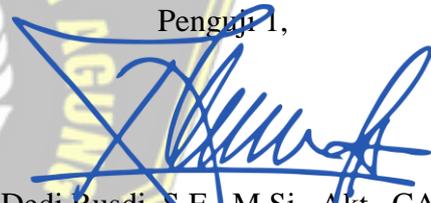
Susunan Dewan Penguji

Pembimbing,



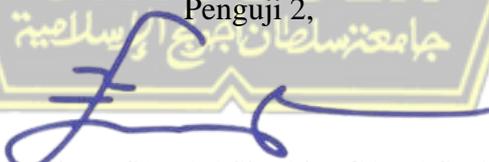
Dr. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIK. 211402010

Penguji 1,



Dedi Rusdi, S.E., M.Si., Akt., CA.
NIK. 211496006

Penguji 2,



Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., CA., ASEAN CPA., CRP.
NIK. 211492003

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi Tanggal 26 Mei 2025

Ketua Program Studi S-1 Akuntansi



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP., Ph.D.
NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mellya Oka Rahmawati

NIM : 31402300204

Program Studi : S-1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul:

“Interpretasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Analisis Kondisi Keuangan Tahun 2022-2024”.

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 2025

Yang Menyatakan,



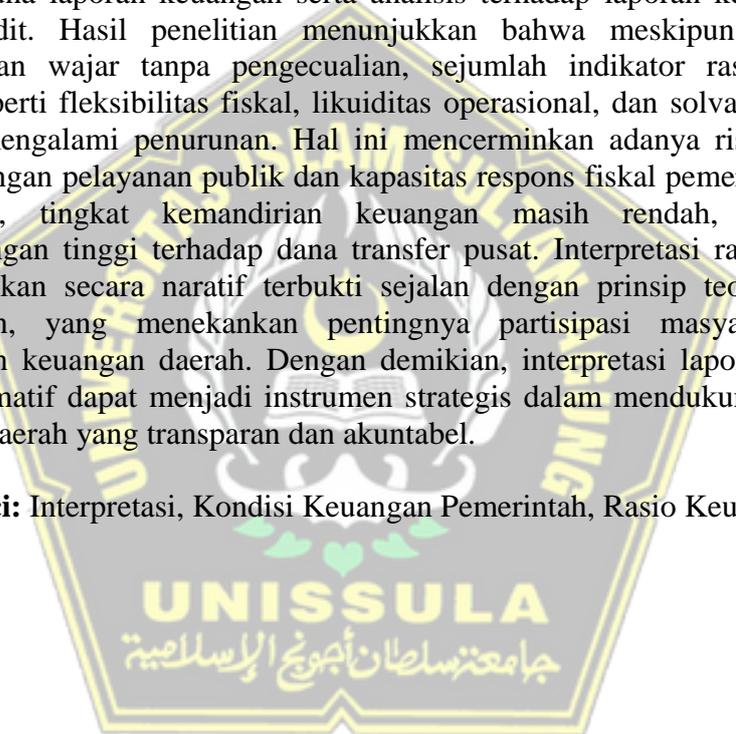
Mellya Oka Rahmawati
NIM. 31402300204

ABSTRAK

Interpretasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Analisis Kondisi Keuangan Tahun 2022- 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2022–2024 pasca pandemi COVID-19 guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pemahaman publik terhadap informasi keuangan daerah. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara dengan penyusun dan pengguna laporan keuangan serta analisis terhadap laporan keuangan yang telah diaudit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun opini audit menunjukkan wajar tanpa pengecualian, sejumlah indikator rasio keuangan utama—seperti fleksibilitas fiskal, likuiditas operasional, dan solvabilitas jangka pendek—mengalami penurunan. Hal ini mencerminkan adanya risiko terhadap kesinambungan pelayanan publik dan kapasitas respons fiskal pemerintah daerah. Selain itu, tingkat kemandirian keuangan masih rendah, menandakan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat. Interpretasi rasio keuangan yang disajikan secara naratif terbukti sejalan dengan prinsip teori pemangku kepentingan, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian, interpretasi laporan keuangan yang informatif dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Interpretasi, Kondisi Keuangan Pemerintah, Rasio Keuangan



ABSTRACT

This study aims to interpret the financial statements of the Bojonegoro Regency Government for the period 2022–2024 in the post-COVID-19 context, with the goal of enhancing transparency, accountability, and public understanding of regional financial information. Using a descriptive qualitative approach and case study design, data were collected through interviews with financial report preparers and users, as well as analysis of audited financial statements. The findings reveal that although the audit opinion was unqualified, several key financial ratios—such as fiscal flexibility, operational liquidity, and short-term solvency—showed a declining trend. This indicates potential risks to the sustainability of public services and the regional government's fiscal response capacity. Furthermore, the low level of financial independence reflects a high dependency on intergovernmental transfers. Narrative-based interpretation of financial ratios aligns with stakeholder theory, which emphasizes public participation in overseeing government finance. Thus, providing clear and relevant interpretations of financial statements can serve as a strategic instrument in promoting transparent and accountable financial governance at the regional level.

Keywords: *Interpretation, Government Financial Conditions, Financial Ratios*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik yang berjudul **“Interpretasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Analisis Kondisi Keuangan Tahun 2022-2024”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi skripsi dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sudah sepatutnya dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan hamba-Nya dalam segala urusan.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dedi Rusdi, SE., M.Si., Ak., CA dan Ibu Sri Dewi Wahyundaru, SE, Mi, Ak, CA selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah bersedia memberikan masukan dan waktu untuk menguji saya.
5. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmunya, sehingga penulis mendapat pengetahuan yang dapat digunakan dimasa yang akan datang.
6. Kepada Bapak Rahmat dan Ibu Kamini selaku orangtua saya serta keluarga yang telah memberikan do'a dan support dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Ahmad Muzaki Zuhdi selaku calon suami yang selalu memberikan semangat, waktu, dukungan, bantuan dan do'a selama ini.
8. Terimakasih untuk teman-teman S-1 Akuntansi RPL Bojonegoro 2023 yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih untuk rekan-rekan kerja pada BPKAD Kabupaten Bojonegoro yang telah memberi dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasanya masih ada keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki dalam penyusunan Skripsi ini. Penulis menantikan kritik, saran juga pesan dari pembaca. Besar harapan penulis bahwa hasil Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2024

Penulis



Mellya Oka Rahmawati

Nim. 31402300204

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	5
1.3 TUJUAN PENELITIAN	6
1.4 MANFAAT PENELITIAN	7
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II TINJAUAN LITERATUR	9
2.1 TEORI KEAGENAN DALAM PEMERINTAHAN	9
2.1.1 TEORI <i>STAKEHOLDER</i>	10
2.2 KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH	11
2.3 DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)	14
2.4 INTERPRETASI LAPORAN KEUANGAN	16
2.5 RASIO KEUANGAN	17
2.6 PENELITIAN TERDAHULU	21
2.7 KERANGKA PENELITIAN	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. DESAIN PENELITIAN	30
3.2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	30

3.3. METODE PENGUMPULAN DATA.....	32
BAB IV PROFIL ORGANISASI.....	34
4.1. PROFIL DAN SEJARAH ORGANISASI.....	34
4.2. VISI DAN MISI ORGANISASI.....	35
4.3. STRUKTUR, TUGAS, DAN FUNGSI ORGANISASI.....	36
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	39
5.1. URGENSI INTERPRETASI LAPORAN KEUANGAN DARI SUDUT PANDANG PENYUSUN DAN PENGGUNA.....	39
5.2. ANALISIS RASIO ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022-2024.....	42
5.2.1. RASIO OPERASI DAN KOMITMEN LAYANAN.....	42
5.2.2. RASIO KELENTURAN KEUANGAN.....	43
5.2.3. RASIO LIKUIDITAS OPERASIONAL.....	44
5.2.4. RASIO SOLVABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK.....	45
5.2.5. RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN.....	47
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
6.1. KESIMPULAN.....	50
6.2. SARAN.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	28
Tabel 5.1	Tabel Rasio Operasi dan Komitmen Layanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024	50
Tabel 5.2	Tabel Rasio Kelenturan Keuangan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024	51
Tabel 5.3	Tabel Rasio Likuiditas Operasional Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024	53
Tabel 5.4	Tabel Rasio Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024	54
Tabel 5.5	Tabel Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian Interpretasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Analisis Kondisi Keuangan Tahun 2022-2023	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kab. Bojonegoro	35
Gambar 5.1 Diagram Venn Persepsi Penyusun dan Pengguna Laporan Keuangan Daerah	49
Gambar 5.2 Grafik Rasio Operasi dan Komitmen Layanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024	51
Gambar 5.3 Grafik Rasio Kelenturan Keuangan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024	52
Gambar 5.4 Grafik Rasio Likuiditas Operasional Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024	53
Gambar 5.5 Grafik Rasio Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024	54
Gambar 5.6 Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024	55



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah pada tahun 2001, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan secara mandiri. Otonomi daerah merupakan hak serta wewenang yang dimiliki oleh suatu daerah guna mengatur dan mengelola kepentingan pemerintahan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Kebijakan ini bersumber dari mandat konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengalami amendemen pada tahun 2000, dan selanjutnya diatur lebih lanjut melalui regulasi khusus mengenai pemerintahan daerah (Kurniawan, 2012 dalam Christia & Ispriyarso, 2019).

Dalam konteks desentralisasi fiskal, otonomi daerah secara teoritis diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk mendorong kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Iskandar, 2021; Agustina, 2013 dalam Iskandar, 2021). Dengan kata lain, desentralisasi fiskal merupakan instrumen penting dalam memperkuat kemandirian daerah dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal.

Menjelang akhir tahun 2022, penyebaran COVID-19 di Indonesia menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan awal pandemi pada Maret 2020.

Kementerian Kesehatan mencatat total kasus terkonfirmasi sebanyak 6.719.815 orang, dengan 6.549.332 orang dinyatakan sembuh dan 160.612 meninggal dunia. Positivity rate harian mencapai 2,78% dan mingguan (periode 25–31 Desember 2022) sebesar 2,68%, tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, pemerintah daerah diberikan fleksibilitas dalam menetapkan prioritas anggaran, melakukan penyesuaian, serta mengalokasikan belanja untuk penanganan pandemi, dengan tetap berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan. Situasi ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dalam aspek pengelolaan maupun pelaporan keuangan.

Transparansi dimaknai sebagai penyediaan informasi dan pengungkapan yang memadai kepada publik melalui laporan keuangan pemerintah. Transparansi diperlukan agar publik dapat menjalankan hak atas informasi, hak untuk mengetahui, dan menyampaikan aspirasi. Dalam kerangka akuntansi pemerintahan, transparansi mengacu pada penyajian informasi keuangan yang dapat diandalkan dan tepat waktu guna mendukung pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan (Tarigan & Nurtanzila, 2013).

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, proses akuntansi meliputi tahapan identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, peringkasan, penyajian, hingga

interpretasi atas transaksi keuangan. Seluruh hasil dari proses tersebut disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). LKPD berfungsi sebagai instrumen utama yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menilai sejauh mana pemerintah melaksanakan anggaran. Tingkat akuntabilitas pemerintah dapat dievaluasi melalui analisis laporan keuangan, yang berguna untuk menilai kondisi keuangan saat ini dan memperkirakan prospek keuangan di masa mendatang.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2021), literasi keuangan diartikan sebagai kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang secara bersama-sama membentuk sikap serta perilaku individu dalam membuat keputusan dan mengelola keuangan guna mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, diketahui bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih berada pada angka 49,68%. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan menunjukkan capaian yang lebih tinggi, yakni sebesar 85,10%. Fakta ini mencerminkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki kapasitas memadai untuk memahami informasi keuangan, termasuk dalam konteks pengelolaan APBD oleh pemerintah daerah.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, total pendapatan setelah perubahan tercatat sebesar

Rp5,45 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp8,07 triliun. Kesenjangan antara pendapatan dan belanja ditutupi oleh pembiayaan yang sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp2,61 triliun. Kondisi keuangan daerah mengalami surplus seiring meningkatnya penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil sensus penduduk pada September 2020, Kabupaten Bojonegoro memiliki jumlah penduduk 1.301.635 jiwa.

SILPA idealnya dimanfaatkan untuk menutupi defisit, mendukung pembangunan, dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, berdasarkan data BPS tahun 2023, meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro meningkat dari 71,15 menjadi 71,8, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur (74,65) dan menempatkan Bojonegoro di peringkat 27 dari 38 kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran, termasuk penggunaan SILPA, belum sepenuhnya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama sepuluh tahun berturut-turut hingga tahun 2023. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) mencapai 91,18% hingga Semester II 2023. Meskipun demikian, Ritonga, (2014) menegaskan bahwa opini WTP tidak selalu mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah yang sesungguhnya. Menurut Febriyanto & Adi (2016) dalam Rastika, (2022), Analisis rasio keuangan berperan sebagai instrumen yang menghubungkan antara proses pengelolaan dan hasil kinerja

perusahaan dengan pemiliknya, yang dilaporkan secara berkala dalam periode tertentu. Selain itu, analisis ini juga berfungsi sebagai dasar pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan baru. Hal ini tentunya juga berlaku bagi pemerintah daerah selaku pengelola APBD yang bertanggungjawab kepada rakyat selaku stakeholder. Namun dalam hal ini, Putri, (2023) menyatakan bahwa sebagian masyarakat belum memiliki kemampuan untuk memahami dan menganalisis informasi keuangan secara mendalam.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang memberikan interpretasi atau penafsiran yang lebih berarti atas laporan keuangan yang telah disusun agar lebih mudah dipahami dan dapat diterima oleh seluruh stakeholder dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah melalui Skripsi yang berjudul **“Interpretasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Analisis Kondisi Keuangan Tahun 2022-2024”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Penelitian dilakukan terkait bagaimana interpretasi atau pemaknaan yang tepat atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro pasca pandemi covid-19 dengan menganalisis kondisi keuangan pemerintah tahun 2022-2024. Bagaimana kondisi keuangan pemerintah daerah yang sesungguhnya dapat disajikan secara lebih informatif dalam laporan keuangan sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh berbagai kalangan.

Oleh karena itu penelitian ini hendak menguji beberapa persoalan sebagai berikut:

- 1) Apakah interpretasi atau pemaknaan yang berarti atas laporan keuangan yang disajikan penting untuk dilakukan?
- 2) Bagaimana interpretasi yang seharusnya diberikan atas laporan keuangan pemerintah daerah?
- 3) Bagaimana interpretasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat bermanfaat bagi *Stakeholder*?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1) Menganalisis kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022-2024 untuk mengukur ketercapaian pengelolaan keuangan yang telah diamanahkan oleh rakyat yang merupakan wujud dari kondisi keuangan pemerintah daerah tersebut.
- 2) Memberikan interpretasi terhadap kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022-2024 melalui analisis beberapa rasio keuangan.
- 3) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan dari sisi keterpahaman atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022-2024

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1) Manfaat Teoritis

Interpretasi laporan keuangan mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan memberikan informasi yang jelas tentang kondisi keuangan, pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap pelaksanaan APBD yang etis dan dapat diandalkan. Selain itu, Interpretasi laporan keuangan dapat menjadi alat untuk mengukur kondisi pemerintah dari waktu ke waktu.

2) Manfaat Praktis

Interpretasi laporan keuangan membantu pemegang kepentingan dalam memahami kondisi keuangan suatu entitas. Interpretasi laporan keuangan juga dapat membantu *Stakeholder*, dalam hal ini seperti masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa serta pemerintah itu sendiri untuk melakukan pengambilan keputusan dan evaluasi kondisi pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan alokasi sumber daya.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi 6 bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, peneliti akan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Batasan penelitian dan sistematika penulisan sebagai acuan penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti akan menguraikan topik-topik yang membuat penulis tertarik dalam mengangkat fokus

masalah yang akan diteliti serta kondisi umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Perumusan masalah merupakan fokus penelitian sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih fokus dan mendalam.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Pada bab ini, penulis akan mendeskripsikan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dalam penelitian. Penjelasan teori-teori tersebut bertujuan agar memudahkan peneliti dalam melakukan analisis serta memberikan jawaban terkait rumusan masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan metodologi penelitian yang akan menguraikan beberapa penjelasan bagaimana kerangka penelitian yang digunakan peneliti, metode pengambilan data, kuesioner yang akan digunakan, dan cara pengolahan data.

BAB IV PROFIL ORGANISASI

Dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti. Baik dari nilai-nilai, visi, misi perusahaan. Bagaimana struktur organisasi perusahaan dan sejarah singkat perusahaan.

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan melakukan kajian terkait rumusan masalah penelitian yang mendasarkan dengan teori-teori yang terdapat dalam bab II. Bagian ini merupakan proses serta hasil dari penelitian ini guna menjawab rumusan masalah penelitian sehingga merupakan bagian terpenting dari penelitian ini.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan terkait analisis serta penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan saran untuk objek penelitian. Saran yang diberikan peneliti bersifat membangun dan inspiratif bagi para pembaca yang akan melaksanakan penelitian kedepannya serta menjadi pedoman dari apa yang akan diteliti agar penelitian yang akan dilakukan dapat berjalan dengan maksimal untuk mencapai tujuan penelitian.



BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 TEORI KEAGENAN DALAM PEMERINTAHAN

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Hoesada (2020), Hubungan keagenan dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kontraktual, di mana satu pihak atau lebih, yang disebut sebagai prinsipal, memberikan kewenangan kepada pihak lain, yaitu agen, untuk menjalankan tugas tertentu atas nama prinsipal. Dalam hubungan ini, terjadi pelimpahan sebagian kewenangan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, Verhoest et al. (2016) menyatakan bahwa agensi atau lembaga merupakan organisasi yang beroperasi secara relatif independen dari pemerintah, yang bertugas melaksanakan fungsi publik, menerapkan kebijakan, mengatur pasar maupun sektor kebijakan, serta memberikan layanan publik (hlm. 1). Selanjutnya, Van Thiel (2016), dalam buku yang sama, menekankan bahwa terdapat banyak perbedaan dalam proses pembentukan dan implementasi agensi (*agencification*) di berbagai negara (hlm. 18).

Dalam ranah pemerintahan daerah, teori keagenan menjelaskan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai agen yang memiliki tanggung jawab kepada masyarakat selaku prinsipal. Tanggung jawab tersebut mencakup pengelolaan keuangan daerah serta penyampaian pertanggungjawaban melalui penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan,

bahkan menghilangkan, potensi konflik keagenan yang mungkin timbul antara kedua belah pihak (Maria & Halim, 2021). Teori keagenan mengemukakan adanya kemungkinan timbulnya konflik kepentingan antara pihak agen dan prinsipal. Untuk mengurangi atau menghilangkan potensi konflik tersebut, serta mencegah terjadinya asimetri informasi, diperlukan penerapan mekanisme yang mencakup pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan (Jensen & Meckling, 1976 dalam Chintya, K. D. & Maria, E., 2023).

2.1.1 TEORI STAKEHOLDER

Menurut (Freeman, 1984) dalam (Buchori, WPM., 2020), stakeholder merupakan individu atau kelompok yang memiliki pengaruh terhadap, atau dipengaruhi oleh, aktivitas suatu organisasi atau entitas. Pihak-pihak yang termasuk dalam kategori stakeholder antara lain pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok bahan baku, pemerintah, masyarakat sekitar, serta karyawan, termasuk juga pihak-pihak lainnya yang memiliki keterkaitan.

Meskipun Teori Stakeholder awalnya dikembangkan untuk diterapkan dalam konteks perusahaan sektor swasta, pada praktiknya pendekatan ini juga relevan digunakan di sektor publik. Sebagian besar prinsip dalam teori ini dapat diadaptasi dalam pengambilan keputusan manajerial atau kebijakan oleh para pemimpin pemerintahan. Dalam organisasi atau entitas sektor publik, penerapan Teori Stakeholder berfungsi sebagai indikator untuk menilai sejauh mana lembaga tersebut mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Penyajian laporan keuangan yang berkualitas menjadi penting,

karena informasi yang disampaikan melalui laporan tersebut memberikan manfaat signifikan bagi stakeholder dalam proses pengambilan keputusan.

2.2 KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya memiliki tujuan untuk menyelaraskan antara kebijakan ekonomi makro dengan ketersediaan sumber daya yang ada, memastikan alokasi sumber daya dilakukan secara optimal sesuai arah kebijakan pemerintah daerah, serta menciptakan kondisi yang mendukung pengelolaan anggaran secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam konteks tersebut, pengelolaan anggaran menjadi aspek yang krusial agar anggaran dapat berfungsi secara efektif. Fungsi tersebut antara lain: (1) memberikan arah kebijakan ekonomi daerah dan menunjukkan secara jelas pemanfaatan sumber daya milik masyarakat; (2) menciptakan stabilitas dalam ekonomi makro daerah; dan (3) menjadi instrumen evaluasi dan pengendalian untuk meminimalkan ketimpangan dan kesenjangan di berbagai sektor pembangunan daerah.

Menurut Halim (2007) dalam Runjung, Primastuti, dan Riswati (2022), pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan, mendorong pembangunan, dan melakukan pelayanan masyarakat. Pemerintah juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang diperoleh dari masyarakat. Laporan ini menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Salah satu metode yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah melalui

analisis keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disusun dan diimplementasikan.

Menurut Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA, 1997) dalam (Ritonga, 2023), kondisi keuangan pemerintah dapat diartikan sebagai tingkat kesehatan keuangan yang dinilai berdasarkan aspek keberlanjutan, kerentanan, dan fleksibilitas dalam kerangka lingkungan ekonomi dan keuangan secara menyeluruh. Selanjutnya, (Zafra-Gómez, dkk., 2009) dalam (Putri, 2022) menjelaskan bahwa kondisi keuangan, dalam konteks kesehatan fiskal (financial health), mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban utangnya serta dalam menyediakan layanan publik pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Semakin baik kondisi keuangan pemerintah, maka semakin sehat pula posisi keuangan yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan memiliki hubungan erat dengan kemampuan pemerintah dalam memenuhi komitmen finansialnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Lebih lanjut, (Ritonga, 2023) menekankan bahwa kondisi keuangan pemerintah berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan bernegara. Dengan kata lain, kondisi keuangan merupakan cerminan dari dampak finansial yang timbul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan aktivitas pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melalui bagian pembukaannya, menetapkan empat tujuan utama negara, yakni: melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh wilayah

tanah air; meningkatkan kesejahteraan masyarakat; mencerdaskan kehidupan bangsa; serta berperan aktif dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Realisasi tujuan-tujuan tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. APBD menjadi sarana yang efektif untuk mengalokasikan sumber daya keuangan demi mendukung pelaksanaan program-program pembangunan dan penyediaan layanan publik di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di tingkat daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran strategis dalam pencapaian tujuan negara Indonesia karena keduanya menentukan arah alokasi sumber daya keuangan untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik di berbagai wilayah. Melalui APBN dan APBD, pemerintah dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur seperti fasilitas transportasi, pendidikan, dan kesehatan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar daerah. Selain itu, alokasi anggaran juga digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan layanan kesehatan sebagai upaya meningkatkan produktivitas serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial, APBN/APBD mendanai berbagai program pemberdayaan masyarakat, bantuan usaha, serta penyediaan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan

perumahan layak. Anggaran juga dialokasikan untuk perlindungan lingkungan melalui kegiatan konservasi, mitigasi bencana, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Lebih lanjut, pengembangan ekonomi lokal turut menjadi fokus dengan mendukung sektor-sektor potensial seperti pariwisata dan usaha kecil dan menengah (UKM), guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan demikian, APBN dan APBD merupakan instrumen utama dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah secara berkelanjutan. Pengelolaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan tujuan negara secara menyeluruh.

2.3 DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan instrumen utama yang memberikan gambaran mengenai posisi keuangan dan berbagai transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai SAP. Penerapan regulasi ini menandai peralihan sistem pencatatan akuntansi pemerintah dari basis kas menjadi basis kas menuju akrual, hingga akhirnya ke basis akrual secara penuh.

Dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sejalan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepala daerah bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang tepat. Kebijakan tersebut harus mencakup prinsip-prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Hal ini merupakan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penetapan kebijakan akuntansi tersebut dapat dilakukan melalui penerbitan Peraturan Kepala Daerah yang mengacu pada Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Meskipun terdapat kemungkinan perbedaan kebijakan akuntansi antar daerah, seluruh kebijakan tersebut tetap harus selaras dengan regulasi nasional yang berlaku (Ratna, dkk. 2023). Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menerbitkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2023, yang menggantikan Peraturan Bupati sebelumnya, yaitu Nomor 49 Tahun 2014 dan Nomor 28 Tahun 2020, terkait Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menyusun Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai suatu mekanisme yang digunakan Kabupaten Bojonegoro untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi. Sistem ini melibatkan serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan metode akuntansi double entry, yang mencakup penggunaan alat-alat seperti jurnal, buku besar, neraca saldo, dan

laporan keuangan. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah, informasi keuangan dapat disajikan secara andal, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan sebagai bahan evaluasi dan salah satu instrumen pengambilan Keputusan.

2.4 INTERPRETASI LAPORAN KEUANGAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, interpretasi diartikan sebagai pemberian makna, pandangan, atau penafsiran terhadap suatu hal berdasarkan sudut pandang tertentu, baik secara teoritis maupun praktis. Dalam konteks keuangan, interpretasi terhadap laporan keuangan merujuk pada proses analisis terhadap informasi keuangan yang tercantum dalam laporan suatu entitas bisnis. Proses ini bertujuan untuk memahami kondisi keuangan dan kinerja operasional entitas secara lebih mendalam. Interpretasi laporan keuangan memiliki peranan penting bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi, seperti manajemen internal, investor, kreditor, hingga lembaga pengawas dan regulator.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan didefinisikan sebagai dokumen yang disusun secara terstruktur, berisi informasi mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan menjadi elemen inti dalam sistem pelaporan keuangan secara keseluruhan. Secara umum, laporan ini terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan catatan atas laporan keuangan, serta informasi penjelas lain yang merupakan

bagian integral dari laporan keuangan tersebut, misalnya laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan sebagaimana dikemukakan oleh (Tullah, Apriyanti, dan Suryati, 2019), laporan keuangan memiliki sejumlah karakteristik kualitatif yang terdiri atas empat unsur utama, yang memegang peranan penting dalam menjamin pemanfaatan informasi secara optimal oleh para pemangku kepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Karakteristik tersebut antara lain: Relevan (relevance), Keandalan (reliability), Dapat dibandingkan (comparability), dan Dapat dipahami (understandability).

2.5 RASIO KEUANGAN

Agar dapat dipahami secara optimal oleh para pemangku kepentingan, laporan keuangan perlu dianalisis untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan pemerintah. Menurut (Amal, M. I., & Wibowo, P., 2022), analisis laporan keuangan merupakan proses penelaahan terhadap berbagai informasi yang tercantum dalam laporan keuangan guna mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan suatu entitas. Dalam konteks pemerintahan, kondisi keuangan dapat diukur melalui penggunaan rasio keuangan yang terdapat dalam Sistem Pemantauan Tren Keuangan, sebagaimana dikembangkan oleh Ritonga (2014) dalam Putri (2022).

1. Rasio Operasi dan Rasio Komitmen Layanan

Rasio operasi dan rasio komitmen berfungsi sebagai alat untuk menilai kapasitas operasional suatu organisasi dalam memperoleh sumber daya melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu, kedua rasio ini juga digunakan untuk mengukur sejauh mana sumber daya yang tersedia mampu mendukung kelangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tanpa mengurangi tingkat layanan yang telah dicapai sebelumnya (Ritonga, 2014). Kondisi operasional organisasi dapat dilihat dari nilai perubahan (Δ) atas kombinasi dua rasio berikut

$$\text{Rasio Operasi (A1)} = \frac{\text{Surplus/Defisit (LO)}}{\text{Total Beban}}$$

$$\text{Rasio Operasi (A2)} = \frac{\text{Surplus/Defisit (LO)}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$\text{Rasio Komitmen (B1)} = \frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan Aktiva Tetap}}$$

$$\text{Rasio Komitmen (B2)} = \frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan Aktiva Tetap}}$$

Terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam analisis ini, antara lain:

- a. Jika $\Delta A1$ atau $\Delta A2$ dan $\Delta B1$ atau $\Delta B2$ semakin naik dari tahun ke tahun, maka kondisi kemampuan beroperasi organisasi adalah baik.
- b. Jika $\Delta A1$ atau $\Delta A2$ semakin naik dari tahun ke tahun sedangkan $\Delta B1$ atau $\Delta B2$ menurun dari tahun ke tahun, maka kondisi kemampuan beroperasi organisasi adalah buruk.

- c. Jika $\Delta A1$ atau $\Delta A2$ menurun dari tahun ke tahun sedangkan $\Delta B1$ atau $\Delta B2$ semakin naik dari tahun ke tahun, maka kondisi kemampuan beroperasional organisasi adalah kurang baik.
- d. Jika $\Delta A1$ atau $\Delta A2$ dan $\Delta B1$ atau $\Delta B2$ semakin naik dari tahun ke tahun, maka kondisi kemampuan beroperasional organisasi adalah baik.

2. Rasio Kelenturan Keuangan

Kelenturan keuangan merupakan salah satu indikator yang mencerminkan ketersediaan sumber daya bebas yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Indikator ini diukur berdasarkan kemampuan pendapatan operasional suatu organisasi dalam menutupi pengeluaran wajib yang harus dilakukan setiap tahunnya. Pengeluaran wajib tersebut mencakup seluruh jenis belanja yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah guna mempertahankan standar layanan yang telah tersedia.

$$\text{Rasio A} = \frac{(\text{Pendapatan Operasional} - \text{Belanja Wajib})}{\text{Total Belanja}}$$

$$\text{Rasio B} = \frac{(\text{Pendapatan Operasional} - \text{Belanja Wajib})}{\text{Total Belanja Wajib}}$$

$$\text{Rasio C} = \frac{(\text{Pendapatan Operasional} - \text{Belanja Wajib})}{\text{Total Pendapatan}}$$

Semakin besar nilai Rasio Kelenturan Keuangan mengindikasikan bahwa daerah masih mempunyai sumber pendanaan di luar belanja wajib (tidak terikat) yang dapat digunakan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat (Ritonga, 2014).

3. Rasio Likuiditas Operasional

Likuiditas operasional merupakan indikator yang mencerminkan kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan aktivitas operasional tanpa mengurangi capaian layanan yang telah diperoleh sebelumnya, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Rasio ini berfungsi untuk mengevaluasi kapasitas pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan dan kesinambungan layanan publik sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat.

$$\text{Rasio Likuiditas Operasional} = \frac{(Kas)}{Belanja\ Wajib}$$

Menurut Ritonga (2014), semakin tinggi nilai rasio likuiditas operasional yang dimiliki suatu organisasi, maka semakin besar pula kemampuannya untuk menjalankan kegiatan operasional tanpa harus menurunkan kualitas maupun kuantitas layanan yang telah tersedia.

4. Rasio Solvabilitas Jangka Pendek

Solvabilitas keuangan jangka pendek mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban finansial yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan. Rasio solvabilitas keuangan jangka pendek merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban lancarnya menggunakan aset lancar yang tersedia. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, rasio ini mencerminkan stabilitas fiskal jangka pendek dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi tekanan likuiditas.

$$\text{Rasio A} = \frac{(\text{Kas dan Setara Kas} - \text{Investasi Jangka Pendek})}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

$$\text{Rasio B} = \frac{(\text{Kas dan Setara Kas} - \text{Investasi Jangka Pendek} + \text{Piutang})}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

$$\text{Rasio C} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

5. Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio kemandirian keuangan merupakan indikator penting yang menggambarkan seberapa besar kapasitas suatu pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerahnya melalui sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), tanpa bergantung pada dana transfer. Apabila nilai rasio ini tinggi, artinya tingkat otonomi fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut semakin kuat.

$$\text{Rasio A} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah LRA}}{\text{Total Pendapatan LRA}}$$

$$\text{Rasio B} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah LRA}}{\text{Total Belanja}}$$

Dengan demikian, rasio kemandirian keuangan yang tinggi merupakan indikator positif bagi kinerja keuangan daerah serta merupakan fondasi penting dalam mewujudkan desentralisasi fiskal yang efektif.

2.6 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian untuk memperkuat landasan teori yang digunakan oleh penulis. Penulis menemukan penelitian terdahulu yang memiliki judul atau topik yang sama dengan penelitian

yang akan dilakukan penulis namun menggunakan metode penelitian yang berbeda. Meskipun demikian, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Tahun	Metode Penelitian	Hasil
1.	Rinaldy, M. (2023)	<p>Metode Penelitian: Pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka berpikir induktif</p> <p>Fokus Penelitian: Menganalisis sejauh mana kemampuan Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, yang diukur melalui Kinerja Keuangan Daerah menggunakan metode Analisis Rasio Keuangan Daerah. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja keuangan tersebut, serta mengevaluasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen dalam mengatasi kendala yang dihadapi.</p> <p>Teknik Pengumpulan Data: Data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019</p>	<p>Hasil analisis terhadap kelima rasio menunjukkan bahwa terdapat dua rasio yang termasuk dalam kategori kurang optimal, yakni rasio kemandirian keuangan daerah yang masih berada pada tingkat sangat rendah, serta rasio keserasian belanja daerah yang belum menunjukkan proporsi yang ideal.</p> <p>Kinerja keuangan daerah mengalami hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia, belum diperbarunya sarana pendukung yang berperan dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta minimnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah strategis, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis, perbaikan dalam manajemen, pemberian keringanan pokok pajak</p>

No	Peneliti Tahun	Metode Penelitian	Hasil
		<p>hingga 2021 dan data primer dari wawancara semi terstruktur serta dokumentasi</p> <p><u>Teknik Analisis Data:</u> Metode reduksi, penyajian data serta penarikan kesimpulan.</p>	<p>dengan ketentuan tertentu, serta optimalisasi pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang ada.</p>
2.	Septiawan, L. (2024)	<p>Metode Penelitian: Statistik deskriptif</p> <p><u>Fokus Penelitian:</u> Mengetahui trend rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas dari kinerja PT Adi Sarana Armada Tbk. pada pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2023.pada pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2023</p> <p><u>Teknik Pengumpulan Data:</u> Penelitian kepustakaan</p> <p><u>Teknik Analisis Data:</u> Teknik analisis data deskriptif</p>	<p>Rasio Likuiditas (Current Ratio): Menunjukkan peningkatan signifikan dari 2020-2021, penurunan pada 2022, dan kenaikan kembali pada 2023. Perusahaan dapat mempertahankan rasio likuiditas yang positif sepanjang periode tersebut.</p> <p>Rasio Solvabilitas (Debt to Equity Ratio): Menurun antara 2020 hingga 2023 karena peningkatan pinjaman bank, obligasi konversi, liabilitas sewa, dan pajak tangguhan.</p> <p>Rasio Profitabilitas (Net Profit Margin): Meningkat pada 2021, menurun tajam pada 2022 akibat penurunan arus kas pendanaan, dan naik lagi pada 2023 karena penurunan biaya penyelenggaraan jasa yang meningkatkan laba bersih.</p> <p>Rasio Aktivitas (Total Assets Turnover): Meningkat dari 2020 hingga 2022, menunjukkan penggunaan</p>

No	Peneliti Tahun	Metode Penelitian	Hasil
			aset yang lebih efisien, namun mengalami penurunan pada 2023 karena kenaikan rata-rata aset perusahaan.
3.	Runjung, R. M. R. P. K., Primastuti, A., & Riswati, R. (2022)	<p>Metode Penelitian: Model penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif</p> <p>Fokus Penelitian: Mengkaji rasio kemandirian keuangan daerah serta dinamika pertumbuhan keuangan di Kota Bandung pada tahun anggaran 2016 hingga 2021, baik pada periode sebelum maupun sesudah terjadinya pandemi Covid-19.</p> <p>Teknik Pengumpulan Data: Studi literasi/dokumen atas Laporan Keuangan Kota Bandung</p> <p>Teknik Analisis Data: Proses analisis data meliputi tiga tahapan utama, yaitu mereduksi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan sebagai hasil akhir dari kegiatan penelitian.</p>	Selama periode 2016 hingga 2021, rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Bandung menunjukkan angka rata-rata sebesar 74,17%, dengan capaian yang secara konsisten berada di atas 60% setiap tahunnya, termasuk pada tahun 2020 yang terdampak pandemi Covid-19. Di sisi lain, pertumbuhan keuangan daerah Kota Bandung selama rentang waktu 2017 hingga 2021 menunjukkan tren positif, meskipun terdapat dua tahun dengan pertumbuhan negatif, yaitu pada tahun 2017 dan 2020, yang masing-masing dipengaruhi oleh faktor internal serta dampak pandemi.

No	Peneliti Tahun	Metode Penelitian	Hasil
4.	Manimbaga, F., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2021)	<p>Metode Penelitian: Pendekatan kualitatif dengan deskriptif</p> <p>Fokus Penelitian: Melakukan analisis terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bitung selama periode tahun anggaran 2014 hingga 2018.</p> <p>Teknik Pengumpulan Data: Studi literasi/dokumen atas Laporan Keuangan Kota Bitung TA. 2014-2018</p> <p>Teknik Analisis Data: Mendeskripsikan temuan dari hasil observasi langsung di lapangan dan wawancara yang berkaitan dengan efektivitas serta efisiensi kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Bitung selama tahun anggaran 2014 hingga 2018.</p>	Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Bitung dalam hal efektivitas selama tahun anggaran 2014 hingga 2018 menunjukkan hasil yang bervariasi, di mana pada tahun 2014 dan 2017 berada dalam kategori efektif, sedangkan pada tahun 2015, 2016, dan 2018 termasuk dalam kategori cukup efektif. Sementara itu, tingkat efisiensi kinerja keuangan pada periode yang sama secara umum telah memenuhi kriteria efisien, kecuali pada tahun 2015 dan 2018 yang dikategorikan tidak efisien.
5.	Rezeki, I. H., & Noviarita, H. (2021)	<p>Metode Penelitian: Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif</p> <p>Fokus Penelitian: Menganalisis kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia selama masa pandemi Covid-19 berdasarkan laporan berkala melalui berbagai indikator rasio keuangan.</p>	Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia tergolong sehat apabila ditinjau dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, dan liabilitas. Kondisi ini tercermin dari nilai rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Financing to Debt Ratio (FDR) yang tetap berada

No	Peneliti Tahun	Metode Penelitian	Hasil
		<p><u>Teknik Pengumpulan Data:</u> Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa laporan keuangan triwulanan yang telah dipublikasikan melalui situs resmi Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020.</p> <p><u>Teknik Analisis Data:</u> analisis deskriptif dengan menganalisis data rasio kinerja keuangan perbankan.</p>	<p>dalam kisaran standar kesehatan keuangan perbankan. Namun, dari aspek rentabilitas dan manajemen operasional, Bank Muamalat Indonesia menunjukkan kondisi yang kurang sehat. Hal ini dibuktikan melalui rasio Return on Assets (ROA) serta rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang berada di bawah standar kinerja bank yang sehat.</p>
6.	Destiani, T., & Hendriyani, R. M. (2022).	<p><u>Metode Penelitian:</u> Metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.</p> <p><u>Fokus Penelitian:</u> Analisis terhadap kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan yang mengacu pada standar industri. Adapun rasio yang digunakan meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas, yang berfungsi sebagai indikator untuk menilai tingkat kesehatan keuangan perusahaan.</p> <p><u>Teknik Pengumpulan Data:</u> Penelitian kepustakaan laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk</p>	<p>Analisis terhadap rasio keuangan PT Unilever Indonesia Tbk menunjukkan bahwa kinerja likuiditas dan solvabilitas perusahaan masih berada di bawah standar industri, yang mengindikasikan kondisi keuangan yang kurang sehat pada aspek tersebut. Sebaliknya, dari sisi profitabilitas, perusahaan menunjukkan kinerja yang sangat baik karena mampu melampaui standar industri dalam menghasilkan laba.</p>

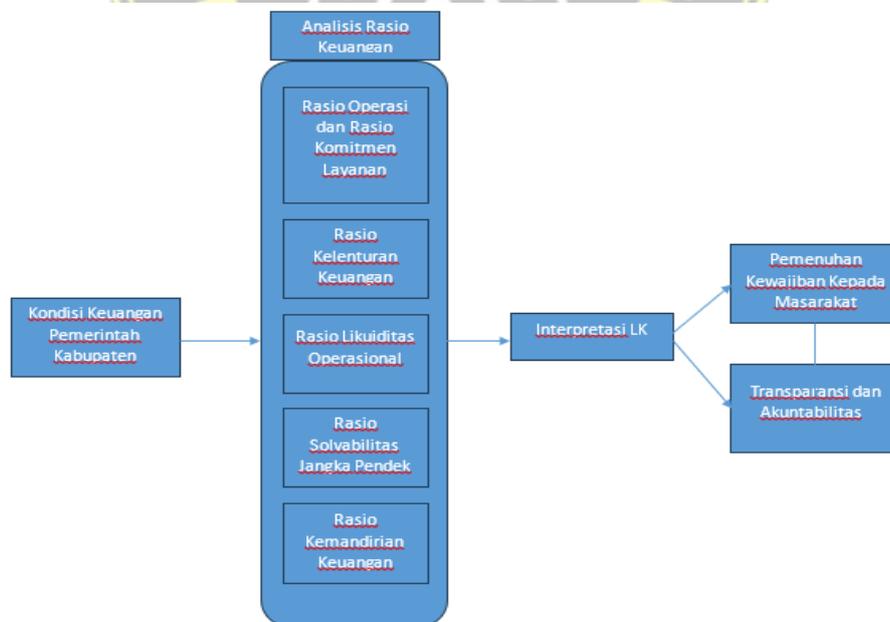
No	Peneliti Tahun	Metode Penelitian	Hasil
		dari tahun 2016 - 2020 dan <u>Teknik Analisis Data:</u> Teknik analisis data deskriptif.	
7.	Yacoub, Y. (2018)	Metode Penelitian: Metode deskriptif <u>Fokus Penelitian:</u> Penilaian terhadap kinerja keuangan daerah, khususnya dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sambas, dilakukan melalui beberapa indikator, yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, serta elastisitas PAD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan terhadap jumlah penduduk. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kapasitas fiskal daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. <u>Teknik Pengumpulan Data:</u> Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dari sumber-sumber resmi seperti BPS, Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, dan	Kinerja keuangan daerah Kabupaten Sambas dalam hal peningkatan pendapatan daerah selama periode 2012 hingga 2016 menunjukkan tren yang meningkat, meskipun bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, total pendapatan daerah yang bersumber dari APBD tercatat sebesar Rp 900.547.992.024,52 dan meningkat menjadi Rp 1.530.823.553.222,48 pada tahun 2016, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 17,50%. Meskipun demikian, tingkat kemandirian fiskal daerah masih tergolong sangat rendah dan cenderung stagnan, disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang tidak stabil setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menjadi pilar utama dalam menopang kapasitas keuangan daerah secara berkelanjutan. Sementara itu, dari segi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Sambas telah menunjukkan kinerja yang baik. Namun, berdasarkan indikator elastisitas, PAD masih tergolong tidak elastis, yang mengindikasikan bahwa

No	Peneliti Tahun	Metode Penelitian	Hasil
		<p>Dirjen Otonomi Daerah, serta didukung oleh wawancara dengan pihak terkait.</p> <p><u>Teknik Analisis Data:</u> Teknik analisis data deskriptif.dengan metode sensus dan <i>time-series-data</i> dari 2012-2016.</p>	<p>potensi sumber-sumber pendapatan daerah belum dimanfaatkan secara optimal.</p>
8..	Sijabat, M. Y. (2014).	<p>Metode Penelitian: Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif</p> <p><u>Fokus Penelitian:</u> Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kemampuan keuangan serta kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Malang dalam pelaksanaan otonomi daerah selama tahun anggaran 2008 hingga 2012.</p> <p><u>Teknik Pengumpulan Data:</u> Wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa data Laporan realisasi APBD Kota Malang tahun 2008-2012.</p> <p><u>Teknik Analisis Data:</u> Metode reduksi, penyajian data serta penarikan kesimpulan.</p>	<p>Kemampuan keuangan Pemerintah Kota Malang menunjukkan tren positif, meskipun masih berada dalam kategori kurang mampu, dengan rata-rata rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) sebesar 13,67% dan Indeks Kemandirian Regional (IKR) sebesar 18,01%. Selama periode 2008 hingga 2012, kinerja keuangan Kota Malang mengalami peningkatan yang cenderung positif. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata tingkat kemandirian keuangan sebesar 16,43%, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 107,7%, serta alokasi belanja yang masih didominasi oleh belanja rutin. Selain itu, rasio pertumbuhan PAD, pendapatan daerah, dan belanja daerah menunjukkan pola yang fluktuatif, sementara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa</p>

No	Peneliti Tahun	Metode Penelitian	Hasil
			kemampuan dan kinerja keuangan Kota Malang belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan upaya pembenahan dalam pengelolaan keuangan daerah secara lebih komprehensif.

2.7 KERANGKA PENELITIAN

Model kerangka penelitian menempatkan pemenuhan kewajiban kepada masyarakat dan transparansi serta akuntabilitas tujuan dilakukannya interpretasi atas kondisi keuangan pemerintah daerah yang tercermin dalam laporan keuangan,. Adapun kerangka penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian Interpretasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Analisis Kondisi Keuangan Tahun 2022-2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. DESAIN PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus dengan analisis kualitatif deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana memberikan interpretasi atau pemaknaan atas Laporan Keuangan yang telah disusun Pemerintah Daerah kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan analisis dan membandingkannya dengan tinjauan literatur.

Menurut (Assyakurrohim, D., dkk, (2023), Istilah "studi kasus" dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "a case study" atau "case studies". Kata "kasus" berasal dari kata "case", yang secara umum berarti kasus, kajian, atau peristiwa. Namun demikian, makna dari kata "case" bersifat kompleks dan memiliki cakupan yang luas tergantung pada konteks penggunaannya. Studi kasus merupakan suatu bentuk eksplorasi terhadap "sistem yang terikat" atau terhadap satu atau beberapa kasus, yang dikaji secara mendalam dalam rentang waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan melalui proses pengumpulan data yang intensif dengan melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dan relevan dalam konteks tertentu. Pendekatan ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif.

3.2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari hasil kajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran

2022 - 2024 serta hasil wawancara atas interpretasi laporan keuangan pada masyarakat. Berikut adalah metode pengumpulan data dalam penelitian ini:

A. Data Primer

Metode primer digunakan untuk mendapatkan data langsung dari sumber aslinya. Dalam konteks ini, peneliti melakukan wawancara terkait laporan keuangan daerah. Wawancara ini dilakukan kepada Tim Penyusun Laporan Keuangan (2 orang dari Bidang Akuntansi dan Investasi BPKAD Kabupaten Bojonegoro) dan 2 orang pengguna laporan keuangan selaku pemangku kepentingan atau *Stakeholder*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan mendalam tentang praktik interpretasi laporan keuangan daerah. Proses wawancara dapat dilakukan baik secara daring maupun luring. Daftar pertanyaan untuk wawancara antara lain sebagai berikut:

1. Apakah Anda mengetahui proses pembuatan laporan keuangan daerah dilakukan?
2. Apakah menurut Anda pemerintah sudah melakukan kewajiban dengan baik terkait pengelolaan keuangan daerah?
3. Apakah terdapat standar atau pedoman tertentu yang seharusnya diikuti dalam penyusunan laporan keuangan?
4. Bagaimana Anda memahami informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan daerah (tanpa interpretasi)?
5. Apakah menurut Anda harus ada ringkasan khusus yang menjelaskan kondisi keuangan pemerintah secara singkat?

6. Jika ya, hal itu (interpretasi dalam bentuk ringkasan) apakah penting untuk dibuat?
7. Jika ya, apakah interpretasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui analisis rasio keuangan dapat dipahami dengan mudah oleh Masyarakat?
8. Apakah Anda dapat mengambil keputusan atau opini berdasarkan laporan keuangan yang disajikan?

B. Data Sekunder

Metode sekunder melibatkan pengumpulan data dari sumber yang telah ada, seperti laporan keuangan, dokumen resmi pemerintah daerah, dan laporan audit. Data sekunder ini akan digunakan untuk mendukung dan memperkuat analisis interpretatif terhadap laporan keuangan daerah. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan temuan mereka dengan tren terbaru dalam interpretasi laporan keuangan daerah.

Dengan kombinasi metode primer dan sekunder, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang praktik interpretasi laporan keuangan daerah, serta kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan di bidang ini.

3.3.METODE PENGUMPULAN DATA

Data dari Laporan Keuangan TA. 2022 hingga 2024 Kabupaten Bojonegoro dihitung menggunakan kelima rasio keuangan yang digunakan. Kemudian, wawancara dengan narasumber akan digunakan untuk menganalisis apakah interpretasi laporan keuangan pemerintah daerah penting sebagai tanggapan terhadap rumusan masalah. Hasil wawancara akan dianalisis untuk menilai pemahaman terhadap laporan keuangan

daerah serta penggunaannya dalam proses pengambilan keputusan serta untuk membuat rekomendasi perbaikan pada titik mana saja yang harus ditingkatkan dalam penyusunan dan interpretasi laporan keuangan daerah.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka akan ditarik kesimpulan dan pemberian interpretasi atas laporan keuangan daerah untuk meningkatkan pemahaman *Stakeholder* atas laporan keuangan.



BAB IV

PROFIL ORGANISASI

4.1. PROFIL DAN SEJARAH ORGANISASI

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang secara astronomis terletak pada posisi 112025' - 112009' Bujur Timur dan 6059' - 7037' Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Bojonegoro memiliki batas-batas: Selatan Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Ngawi, Timur Kabupaten Lamongan, utara Kabupaten Tuban, dan Barat Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Bojonegoro terbagi menjadi 28 kecamatan dan 430 desa/kelurahan. Berdasarkan hasil sensus penduduk pada September 2020, Kabupaten Bojonegoro memiliki jumlah penduduk 1.301.635 jiwa.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki 63 Organisasi Perangkat Daerah dalam struktur pemerintahannya, yang terdiri dari 26 dinas, 6 badan, 3 RSUD, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dan 28 kecamatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan satu-satunya organisasi perangkat daerah yang menjalankan 2 fungsi sekaligus, yaitu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Sebagai PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah), BPKAD memiliki kewenangan meliputi pengelolaan APBD, penarikan dan pembayaran, penatausahaan aset daerah, dan pelaksanaan investasi daerah.

BPKAD Kabupaten Bojonegoro terletak di Jl. Trunojoyo No. 12 A, Kelurahan Kepatihan 62111. BPKAD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro seiring berjalannya waktu mengalami perubahan nama. Awalnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bernama Kantor Kas Daerah yang merupakan bagian dari Sekretariat Daerah. Kemudian berubah nama menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan setelahnya berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka mulai tahun 2017 Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) berganti nomenklatur menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

4.2. VISI DAN MISI ORGANISASI

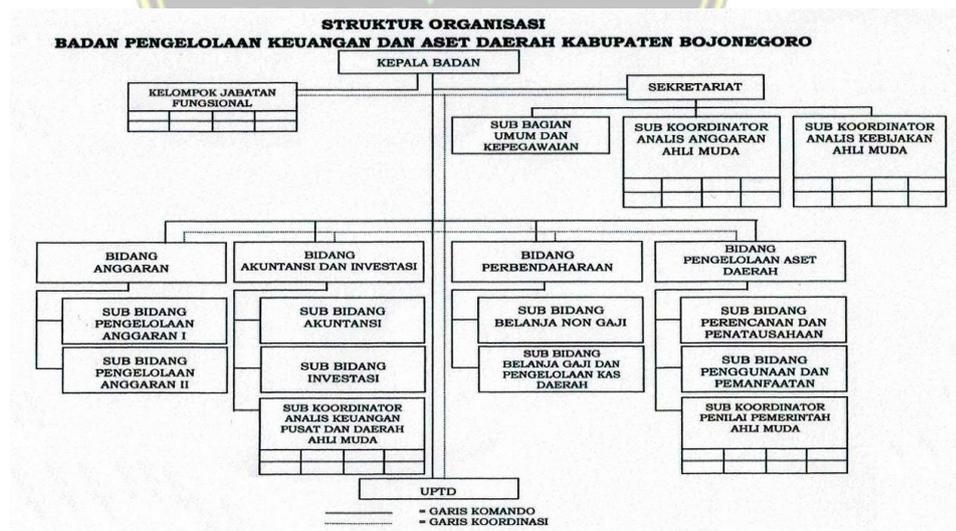
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro memiliki Visi, yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah Secara Profesional, Transparan, Inovatif dan Akuntabel Menuju Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa”.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro juga memiliki Misi sebagai berikut:

- Melaksanakan penganggaran keuangan daerah yang akuntabel dan berkesinambungan.
- Meningkatkan pelayanan perbendaharaan kepada seluruh pihak yang membutuhkan secara cepat, tepat dan akurat.
- Meningkatkan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku.
- Mengelola kekayaan daerah secara cermat, berdayaguna dan efisien.
- Meningkatkan pelayanan administrasi guna mendukung penatausahaan keuangan daerah secara optimal.

4.3. STRUKTUR, TUGAS, DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1
Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Bojonegoro

Menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 93 Tahun 2021, salah satu bidang penting dalam struktur organisasi BPKAD adalah Bidang Akuntansi dan Investasi, yang memiliki tugas pokok dalam mengelola aspek akuntansi serta investasi pemerintah daerah. Sebagai bagian dari fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bidang Akuntansi bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, bidang ini juga menyusun laporan realisasi anggaran untuk semester pertama serta melakukan proyeksi (prognosis) pelaksanaan anggaran selama enam bulan berikutnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang Akuntansi dan Investasi memiliki berbagai fungsi yang mendukung pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Fungsi-fungsi tersebut meliputi perumusan dan penetapan kebijakan sistem akuntansi daerah yang sejalan dengan sistem pemerintahan; pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; penyusunan laporan keuangan dan dokumen pertanggungjawaban anggaran; serta koordinasi pelaksanaan sistem pelaporan keuangan daerah.

Selain itu, bidang ini juga bertugas menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban APBD, serta menyiapkan tanggapan atas hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan evaluasi Gubernur terhadap rancangan tersebut. Fungsi lainnya meliputi konsolidasi laporan keuangan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pengelolaan

data dan informasi keuangan berbasis elektronik, pengembangan sistem informasi akuntansi, serta pengelolaan basis data dan cadangan data secara berkala.

Lebih lanjut, Bidang Akuntansi dan Investasi juga memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan teknis terkait investasi dan pembiayaan daerah. Fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan secara terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.



BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1. URGENSI INTERPRETASI LAPORAN KEUANGAN DARI SUDUT

PANDANG PENYUSUN DAN PENGGUNA

Berdasarkan hasil kajian terhadap persepsi penyusun dan pengguna laporan keuangan daerah, diperoleh sejumlah temuan yang menunjukkan adanya perbedaan pemahaman dan kebutuhan informasi keuangan di antara keduanya.

Pertama, dari sisi pengetahuan mengenai proses penyusunan laporan keuangan daerah, penyusun, khususnya yang berasal dari BPKAD atau instansi teknis, memahami secara menyeluruh proses tersebut, mulai dari pengumpulan data keuangan dari seluruh perangkat daerah, verifikasi, konsolidasi, hingga penyusunan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Di sisi lain, sebagian besar pengguna, seperti DPRD dan masyarakat umum, hanya mengetahui bahwa laporan disusun dan diaudit, namun tidak memahami proses teknis yang mendasarinya.

Kedua, mengenai penilaian terhadap kewajiban pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusun menilai bahwa pemerintah daerah telah berupaya memenuhi tanggung jawabnya dengan baik, yang dibuktikan dengan peningkatan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. Namun, pengguna memiliki pandangan yang lebih kritis, terutama terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan dampaknya terhadap pelayanan publik.

Ketiga, terdapat pemahaman yang selaras bahwa penyusunan laporan keuangan harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, yaitu SAP, serta peraturan lainnya seperti PP No. 71 Tahun 2010 dan regulasi teknis dari Kementerian Dalam Negeri. Namun, standar tersebut cenderung lebih dipahami oleh penyusun, sementara pengguna laporan umumnya hanya fokus pada isi dan hasil akhir tanpa memperhatikan dasar penyusunannya.

Keempat, dalam hal pemahaman terhadap isi laporan keuangan tanpa interpretasi, penyusun dapat memahami informasi tersebut dengan baik karena kesehariannya berkaitan langsung dengan sistem pelaporan. Sebaliknya, pengguna, terutama dari kalangan non-akuntansi, sering kali kesulitan memahami tabel, neraca, dan laporan realisasi anggaran yang disajikan dalam format teknis.

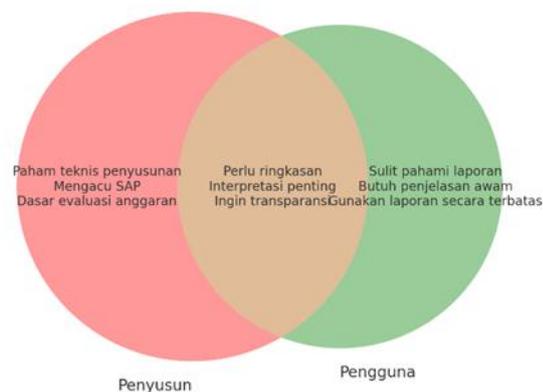
Kelima, baik penyusun maupun pengguna sepakat bahwa perlu adanya ringkasan eksekutif yang menjelaskan kondisi keuangan pemerintah daerah secara ringkas dan mudah dipahami. Ringkasan ini dinilai penting untuk memperluas akses informasi dan meningkatkan transparansi, khususnya kepada publik yang tidak memiliki latar belakang akuntansi.

Keenam, interpretasi laporan keuangan dalam bentuk ringkasan dipandang sangat penting untuk dibuat karena dapat menjembatani kesenjangan pemahaman antara penyusun dan pengguna. Ringkasan yang bersifat naratif dan visual dapat membantu pengguna memahami substansi laporan keuangan tanpa harus menelaah seluruh dokumen yang bersifat teknis.

Ketujuh, dalam konteks analisis rasio keuangan sebagai alat interpretasi, terdapat perbedaan pandangan terkait tingkat pemahaman masyarakat terhadap hasil analisis tersebut. Penyusun menilai bahwa rasio keuangan cukup informatif jika disajikan secara sederhana, sementara pengguna merasa bahwa istilah dan konsep rasio masih sulit dipahami oleh masyarakat awam tanpa adanya penjelasan tambahan.

Terakhir, baik penyusun maupun pengguna menyatakan bahwa laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau opini, meskipun pengguna, terutama masyarakat umum, cenderung menggunakan laporan tersebut secara terbatas dan hanya untuk menarik kesimpulan umum. Sebaliknya, pihak legislatif dan pengawas anggaran menggunakan laporan ini secara lebih aktif dalam pengambilan kebijakan dan evaluasi program.

Diagram Venn: Persepsi Penyusun dan Pengguna Laporan Keuangan Daerah



Gambar 5.1 Diagram Venn Persepsi Penyusun dan Pengguna Laporan Keuangan Daerah

Berikut adalah diagram Venn yang menggambarkan persamaan dan perbedaan persepsi antara penyusun dan pengguna laporan keuangan daerah. Diagram ini

menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam pemahaman teknis, kedua pihak sepakat mengenai pentingnya ringkasan interpretatif dan transparansi informasi.

5.2. ANALISIS RASIO ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022-2024

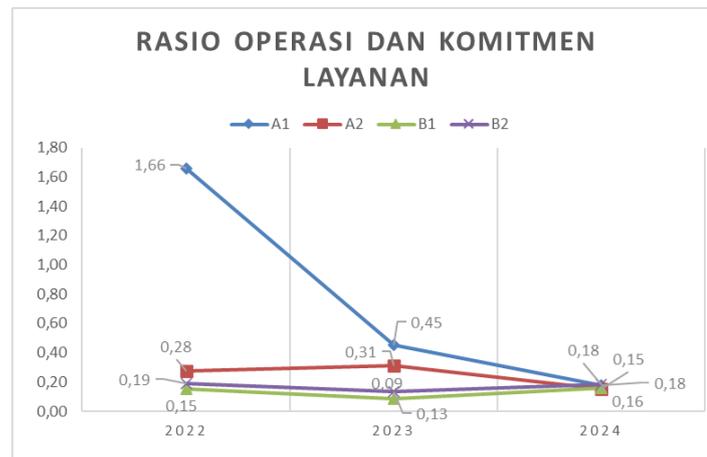
5.2.1. RASIO OPERASI DAN KOMITMEN LAYANAN

Berdasarkan hasil penghitungan, pada tahun 2022-2023 penurunan signifikan nilai perubahan rasio operasi ($\Delta A1$) sebesar -1,2 dan $\Delta A2$ sebesar 0,03 serta nilai perubahan rasio komitmen layanan $\Delta B1$ sebesar -0,07 dan $\Delta B2$ -0,06. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan operasional pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkriteria sangat buruk. Akan tetapi, pada tahun 2023-2024, meski terdapat penurunan ($\Delta A1$) sebesar -0,28 dan $\Delta A2$ sebesar -0,16, terdapat kenaikan $\Delta B1$ sebesar 0,07 dan $\Delta B2$ 0,05, maka kondisi kemampuan beroperasional pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah kurang baik.

Tabel 5.1 Tabel Rasio Operasi dan Komitmen Layanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024

	2022	2023	2024	Δ 2022-2023	Δ 2022-2024
A1	1,66	0,45	0,18	-1,20	-0,28
A2	0,28	0,31	0,15	0,03	-0,16
B1	0,15	0,09	0,16	-0,07	0,07
B2	0,19	0,13	0,18	-0,06	0,05

Sumber: BPKAD Kabupaten Bojonegoro, 2025



Gambar 5.2 Grafik Rasio Operasi dan Komitmen Layanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024

Meskipun sempat turun signifikan di tahun 2023, rasio operasional dan komitmen layanan mengalami peningkatan di tahun 2024, naiknya beban/belanja pemeliharaan menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Bojonegoro masih berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsinya agar mampu meningkatkan dan menjaga kualitas layanan walaupun terjadi penurunan pendapatan maupun efisiensi beban.

5.2.2. RASIO KELENTURAN KEUANGAN

Berdasarkan hasil penghitungan, rasio A, B, dan C mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2022 ke 2023, akan tetapi mengalami penurunan signifikan di ketiganya pada tahun 2024.

Tabel 5.2 Tabel Rasio Kelenturan Keuangan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024

	2022	2023	2024
Rasio A	0,89	0,84	0,62
Rasio B	4,24	4,60	2,67
Rasio C	0,83	0,88	0,72

Sumber: BPKAD Kabupaten Bojonegoro, 2025



Gambar 5.3 Grafik Rasio Kelenturan Keuangan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024

Nilai Rasio Kelenturan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro cenderung kurang baik meskipun memiliki nilai positif dari pembilang (Pendapatan Operasional – Belanja Wajib) yang menunjukkan sumber daya bebas (*free resources*) yang tersedia untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi dana yang tersedia untuk belanja tidak wajib dan pembangunan mulai menyusut. Pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara belanja wajib dan pendapatan operasional untuk menghindari rigiditas anggaran yang tinggi di masa depan.

5.2.3. RASIO LIKUIDITAS OPERASIONAL

Semakin tinggi rasio likuiditas operasional, maka semakin besar pula kemampuan suatu entitas dalam menjalankan aktivitas operasionalnya tanpa harus mengurangi cakupan maupun mutu pelayanan publik yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil pengukuran rasio ini juga mencerminkan ketersediaan kas yang memadai untuk menutup seluruh kewajiban belanja wajib pemerintah daerah.

Tabel 5.3 Tabel Rasio Likuiditas Operasional Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024

	2022	2023	2024
Rasio Likuiditas Operasional	2,86	2,50	1,32

Sumber: BPKAD Kabupaten Bojonegoro, 2025



Gambar 5.4 Grafik Rasio Likuiditas Operasional Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024

Penurunan rasio dari 2,86 menjadi 1,32 mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih likuid dan masih mampu menutupi belanja wajib, kapasitas fiskalnya untuk menghadapi kejadian tak terduga atau membiayai program baru semakin terbatas. Jika tren ini terus berlanjut, maka pemerintah daerah perlu mengevaluasi kebijakan pengelolaan kas dan memperkuat strategi optimalisasi pendapatan serta efisiensi belanja.

5.2.4. RASIO SOLVABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK

Terdapat tren penurunan tajam di ketiga jenis rasio dalam periode tiga tahun terakhir. Rasio A turun dari 38,34 (2022) ke 8,01 (2024), mencerminkan penurunan signifikan dalam ketersediaan kas bersih untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Rasio B, yang memperhitungkan piutang, juga menurun dari 43,84

menjadi 10,34, menunjukkan bahwa meskipun piutang tersedia, jumlah total aset likuid masih belum cukup ideal dibandingkan kewajiban yang ada. Rasio C sebagai indikator umum likuiditas menurun dari 46,63 ke 13,16, menandakan menurunnya kapasitas fiskal daerah dalam menjamin kelancaran pembayaran kewajiban jangka pendek secara menyeluruh.

Tabel 5.4 Tabel Rasio Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024

	2022	2023	2024
Rasio A	38,34	23,94	8,01
Rasio B	43,84	24,37	10,34
Rasio C	46,63	27,91	13,16

Sumber: BPKAD Kabupaten Bojonegoro, 2025



Gambar 5.5 Grafik Rasio Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024

Penurunan yang konsisten di ketiga rasio tersebut mengindikasikan melemahnya posisi keuangan jangka pendek pemerintah daerah. Kondisi ini mencerminkan potensi risiko fiskal yang perlu segera ditangani, terutama dalam menjamin kelancaran pembayaran kewajiban rutin. Oleh karena itu, pemerintah

daerah perlu melakukan evaluasi terhadap strategi pengelolaan kas, pengendalian investasi jangka pendek, serta efektivitas pengumpulan piutang agar kapasitas likuiditas dan solvabilitas tetap terjaga secara optimal.

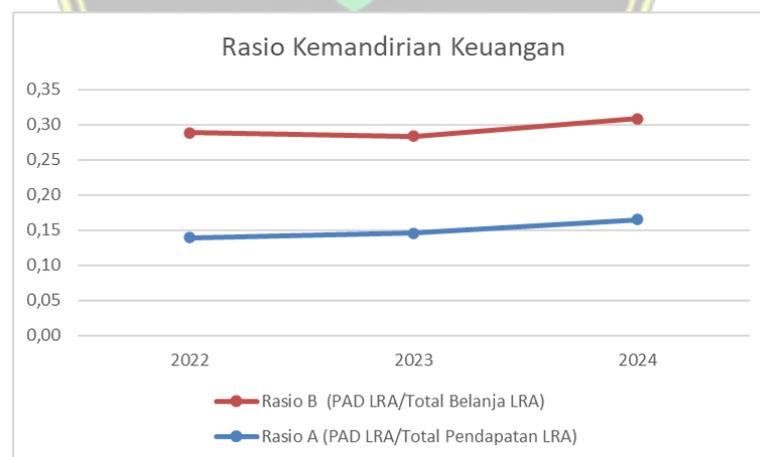
5.2.5. RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN

Berdasarkan data Kabupaten Bojonegoro, Rasio A (PAD terhadap total pendapatan LRA) menunjukkan tren peningkatan yang moderat dari 0,14 pada tahun 2022 menjadi 0,16 pada tahun 2024. Sementara itu, Rasio B (PAD terhadap total belanja LRA) justru mengalami sedikit penurunan, dari 0,15 pada tahun 2022 menjadi stabil di angka 0,14 pada tahun 2023 dan 2024.

Tabel 5.5 Tabel Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024

	2022	2023	2024
Rasio A	0,14	0,15	0,16
Rasio B	0,15	0,14	0,14

Sumber: BPKAD Kabupaten Bojonegoro, 2025



Gambar 5.6 Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024

Peningkatan ini Rasio A mengindikasikan bahwa kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah mengalami perbaikan, meskipun masih berada pada level yang cukup rendah. Dengan kata lain, sebagian besar pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer antar pemerintah. Pada Rasio B, peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan, belum cukup signifikan untuk mendukung keseluruhan belanja daerah secara mandiri.

Secara umum, kedua rasio mencerminkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Bojonegoro masih relatif rendah, yang artinya pemerintah daerah masih sangat tergantung pada sumber pendanaan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan potensi PAD yang lebih optimal, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, serta pengembangan badan usaha milik daerah (BUMD) dan aset daerah yang produktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri, F.C. (2022, 2023) dilakukan dengan metode kuantitatif berdasarkan data laporan keuangan pemerintah daerah dalam kurun waktu 5 tahun, tanpa melakukan wawancara terhadap penyusun maupun pengguna laporan keuangan. Penelitian ini terbatas pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Belum ada regulasi dari pemerintah pusat terkait kewajiban interpretasi laporan keuangan menggunakan analisis rasio.

Transparansi dan interpretasi laporan keuangan daerah yang baik merupakan prasyarat utama dalam mendukung pengambilan keputusan publik yang efektif dan akuntabel. Hasil kajian menunjukkan terdapat kesenjangan

pemahaman antara penyusun dan pengguna laporan keuangan, serta penurunan kinerja keuangan daerah pada berbagai rasio utama seperti likuiditas, solvabilitas, dan kelenturan fiskal. Meskipun penyusun memahami teknis penyusunan sesuai standar akuntansi, pengguna terutama masyarakat umum dan sebagian legislatif kesulitan dalam menafsirkan laporan tanpa penjelasan naratif. Hal ini diperparah dengan rendahnya kemandirian fiskal dan potensi tekanan kas jangka pendek yang meningkat.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KESIMPULAN

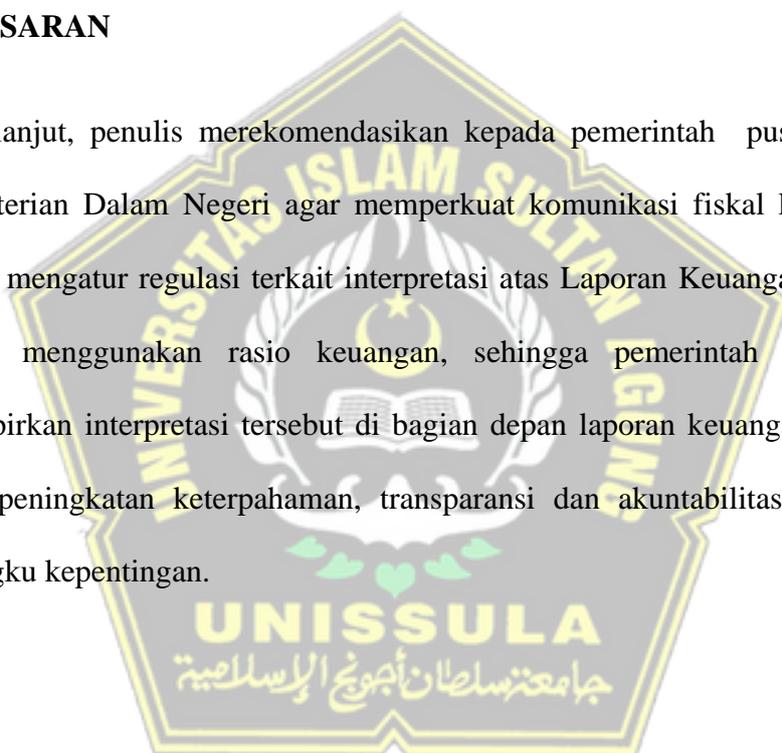
Berdasarkan analisis terhadap lima kelompok rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, ditemukan beberapa temuan penting terkait kondisi fiskal daerah. Pertama, rasio operasi dan komitmen layanan menunjukkan penurunan pada periode 2022–2024, yang mencerminkan efisiensi belanja operasional namun perlu dikaji dampaknya terhadap kualitas layanan publik. Kedua, tren penurunan rasio kelenturan keuangan mengindikasikan menyempitnya ruang fiskal, yang dapat menghambat respons terhadap kebutuhan strategis dan mendesak. Ketiga, rasio likuiditas operasional turun drastis dari 2,86 (2022) menjadi 1,32 (2024), mencerminkan melemahnya kemampuan kas dalam membiayai belanja wajib dan meningkatnya potensi tekanan likuiditas. Keempat, rasio solvabilitas jangka pendek juga menurun, baik dari sisi aset lancar maupun kas bersih terhadap kewajiban lancar, yang menunjukkan peningkatan risiko keuangan jangka pendek. Kelima, rasio kemandirian keuangan masih rendah, dengan dominasi pendanaan dari transfer pemerintah pusat dan provinsi, meskipun terdapat sedikit peningkatan PAD pada 2024.

Secara keseluruhan, hasil analisis menekankan pentingnya evaluasi keuangan daerah tidak hanya dari aspek regulatif, tetapi juga dari kapasitas fiskal, efisiensi, dan keberlanjutan. Pendekatan rasio keuangan dengan narasi yang informatif

sejalan dengan teori stakeholder, dan berperan penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan yang berbasis data. interpretasi laporan keuangan yang naratif dan mudah dipahami sangat penting untuk menjembatani kesenjangan informasi, meningkatkan transparansi fiskal, serta memperkuat kualitas pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah.

6.2. SARAN

Lebih lanjut, penulis merekomendasikan kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri agar memperkuat komunikasi fiskal kepada publik dengan mengatur regulasi terkait interpretasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan rasio keuangan, sehingga pemerintah daerah dapat melampirkan interpretasi tersebut di bagian depan laporan keuangannya sebagai upaya peningkatan keterpahaman, transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K., dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. ISBN: 978-623-5722-91-7.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1-9.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro (2024). *Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro (2020). *Profil Daerah Kabupaten Bojonegoro*.
- BPS Kabupaten Bojonegoro. (2020). Hasil Sensus Penduduk September 2020. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro*.
- BPS Kabupaten Bojonegoro. (2023). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro 2023. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro*.
- Chintya, K. D., & Maria, E. (2023). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Dari Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 586-601. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.7274>
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.
- Destiani, T., & Hendriyani, R. M. (2022). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1), 33-51.
- Fiantika, F., Wasil, M., Jumiyati, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., & Ambarwati, K. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In Rake Sarasin (Issue March). Surabaya: PT. Pustaka Pelajar. <https://scholar.google.com/citations>.
- Iskandar, A. (2021). Desentralisasi dan Efisiensi Belanja Fungsi Pendidikan Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Propinsi Sulawesi Selatan. *Info Artha*, 5(1), 11-24.

- Maria, E., & Halim, A. (2021). Public Governance Dan Korupsi: Bukti Pengujian Dari Indonesia Menggunakan Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Akuntansi*, 11(3), 223–234. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.3.223-234>
- Manimbaga, F., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2).
- Pemerintah Indonesia (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
- Putri, F. C. (2022). Kondisi Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 11(2), 410-415.
- Putri, F. C. (2023). Interpretasi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019-2021. *Jurnal Ekonomika*, 14(1), 145-158.
- Ratna, R., Manurung, J. S., Darmawati, D., Napitupulu, T. T., & Syahdewa, B. I. (2023). Peranan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(1), 25-33. e-ISSN: 2986-3716
- Rastika, D. M. (2022). Analisis Rasio Keuangan dan Prediksi Kebangkrutan dengan Model Altman Z-Score pada Perusahaan Semen Tahun 2016-2019. *JURNAL ACITYA ARDANA*, 2(2), 122–130. <https://doi.org/10.31092/jaa.v2i2.1349>
- Ritonga, I. T. (2014). *Developing A Measure Of Local Government's Financial Condition*. *Journal of Indonesian Economy & Business*, 29(2).
- Ritonga, I. T., & Buanaputra, V. G. (2022). *Developing rules of thumb for the financial conditions of city livability: a study of municipal governments in Indonesia*. *Cogent Business & Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2101327>
- Rinaldy, M. (2023). Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh (Doctoral dissertation, IPDN).
- Rezeki, I. H., & Noviarita, H. (2021). Analisis Rasio Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Islamic Economics Journal*, 7(1), 64. <http://dx.doi.org/10.21111/iej.v7i1.6498>

- Runjung, R. M. R. P. K., Primastuti, A., & Riswati, R. (2022). Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 9(2), 96-111. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP> e-ISSN 2685-6069
- Sijabat, M. Y. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran. 2008-2012) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Tarigan, E. P. A., & Nurtanzila, L. (2013). Standar akuntansi pemerintahan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 17(1), 29-45.
- Tullah, D. S., Apriyanti, E., & Suryati, E. (2019). Faktor penentu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 179-188.
- Verhoest, K., Van Thiel, S., Bouckaert, G., Læg Reid, P., & Van Thiel, S. (Eds.). (2016). *Government agencies: Practices and lessons from 30 countries*. Springer.
- Wardoyo, D.U., Rahmadani, R., & Hanggoro, P.T. (2021). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(1), 39–43. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i1.25>
- Yuliani, N. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 24(1). Retrieved from <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/5558>